

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Pengeran Moenra, Dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Ed.1.Cet.2. Depok: Rajawali Pers.
- Arif Mulyadi, 2005, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Republik Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Chilid Narbuka dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Hari Sabarno, 2007, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah “ Memandu Otonomi Menjaga Kesatuan Bangsa “*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HAW Widjaja, 2004, *Otomoni Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Inu Kencana syafei, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Jakarta : Bayumedia.
- Ni'matul Huda, 2009, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Noer Fauzi dan R. Yanto Zakaria, 2000, *“Mensiasati Otonomi Daerah” dalam Konsorium Pembaruan Agraria*, Insist Press, Ypgyakarta..
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia : UI, Press.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan.

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

### C. Skripsi

Andrian Perwira, 2012, “ *Tugas dan Wewenang Camat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, study pada kantor Camat Pariaman Selatan Kota Pariaman*”, skripsi (Padang, Fakultas Hukum, Universitas Andalas).

Muhamad Akbari 2012, “ *Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan, study Kota Pariaman*” skripsi (Padang, Fakultas Hukum, Universitas Andalas).

### D. Makalah

Teuku Muhammad Radie, 1974, *Makalah : Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman, 1974.

### E. Internet

<http://gajimu.com/tips-karir/kondisi-kerja-dan-kehidupan-di-tengah-pandemi-covid-19-Indonesia/faq-ketenagakerjaan-dan-covid-19/faq-bekerja-di-tengah-pandemi-covid-19>.

<http://jurnal.bpsdmd.jatengprov.go.id>, tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

<https://jurnal.kemendagri.go.id>, tentang Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

